

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran atau pungutan yang dikenakan kepada rakyat/masyarakat yang bersifat wajib dan dilakukan secara terpaksa yang akan dikelola oleh pemerintah negara. Pembayaran pajak tersebut akan kembali kepada rakyat dalam bentuk pengembangan dan pembangunan nasional untuk kepentingan umum dalam segala sektor kehidupan bukan untuk kepentingan pribadi, sehingga rakyat tidak akan merasakan manfaatnya secara langsung. Dalam sifat pajak yang wajib dan memaksa ini, karena terdapat UUD 1945 yang mengatur tentang pemungutan pajak pada pasal 23 ayat (2) yang berbunyi “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Pajak bisa dikatakan sangat penting bagi anggaran kas negara. Oleh karena itu pajak menjadi fokus dan sangat diperhatikan oleh pemerintahan. Di Indonesia terbagi menjadi dua jenis Wajib Pajak (WP), yaitu Wajib Pajak Badan (WPB) dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

Pajak sendiri menjadi bentuk pengabdian rakyat/masyarakat kepada Negara. Tetapi banyak Wajib Pajak (WP) yang tidak menyambut baik peraturan pemungutan pajak ini. Dalam pemungutan pajak, perusahaan menjadi Wajib Pajak (WP) yang berkontribusi paling besar dalam penerimaan Negara. Peraturan Indonesia dalam sistem pemungutan pajak juga berubah menjadi *self assessment* yang berlaku sampai sekarang yang sebelumnya *official assessment*. *Self assessment* sendiri merupakan sistem yang memberikan kepercayaan terhadap

Wajib Pajak (WP) untuk memperhitungkan, melaporkan dan membayarkan jumlah utang pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak (WP). Sistem ini juga yang memungkinkan para Wajib Pajak (WP) melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk mempertahankan jumlah pendapatan mereka. Jumlah pajak sendiri dapat ditentukan dari pendapatan Wajib Pajak (WP) tersebut, sehingga hampir semua Wajib Pajak (WP) melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Definisi penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya penghindaran pajak dengan menggunakan metode dan teknik yang cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan, penghindaran pajak ini dianggap legal dan aman karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan dan dapat memperkecil jumlah pajak yang terutang dari Wajib Pajak (WP) (C. A. Pohan, 2013) sedangkan menurut (Hanlon & Heitzman, 2010) mendefinisikan "*Tax avoidance* sebagai rangkaian aktivitas untuk perencanaan pajak yang bertujuan untuk melakukan pengurangan jumlah pajak eksplisit".

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan serangkaian upaya mencari celah-celah dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang dilakukan oleh para Wajib Pajak (WP) untuk mengurangi, menghindari bahkan menghapuskan utang pajak yang dikenakan terhadap Wajib Pajak (WP). Perusahaan merasa pemungutan pajak ini dapat mengurangi pendapatan yang mereka dapatkan, sedangkan pemerintah menginginkan anggaran yang didapatkan dari Wajib Pajak (WP) ini mendapatkan jumlah yang setinggi-tinggi nya karena akan digunakan untuk pembangunan nasional, mengingat perusahaan merupakan

Wajib Pajak (WP) yang berkontribusi terbesar dalam pembayaran pajak Negara. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang akan melakukan segala cara untuk melakukan penghindaran pajak sehingga dapat meminimalkan beban yang harus perusahaan laporkan dan bayarkan. Pada table dibawah ini akan disajikan presentase realisasi penerimaan pajak pada periode 2015-2019.

**Table 1.1**  
**Persentase Penerimaan Pajak**

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Presentase
2015	1.294 triliun	1.095,77 triliun	84.68 %
2016	1.355 triliun	1.141,45 triliun	84.23 %
2017	1.284 triliun	770,7 triliun	60.02 %
2018	1.424 triliun	1.016 triliun	71.38 %
2019	1.557,6 triliun	1.332,1 triliun	84,4 %

Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/>

Dari hasil presentase penerimaan pajak diatas, menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pajak yang seharusnya diterima Negara tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan oleh Wajib Pajak (WP). Hal ini disebabkan karena banyak Wajib Pajak (WP) yang melakukan *tax avoidance* untuk mengurangi atau meminimalisir beban pajak mereka. Perubahan sistem *official assessment* menjadi sistem *self assessment* yang pemerintah terapkan sehingga memungkinkan para Wajib Pajak (WP) menghitung dan melaporkan jumlah utang pajak mereka sendiri, sehingga hasilnya berbeda dengan jumlah yang pemerintah telah tentukan. Dalam praktik *tax avoidance* ini sebenarnya akan merugikan Negara tetapi tetap dianggap

legal karena tidak melanggar peraturan Undang-Undang dalam penerapannya. Untuk memenuhi tujuan Wajib Pajak (WP) dalam meminimalkan jumlah beban pajak yang seharusnya mereka bayarkan kepada Negara, Wajib Pajak (WP) cenderung akan melakukan berbagai cara agar tujuan tersebut tercapai.

Penelitian ini menggunakan teori agensi. Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan agen (manajemen) dan *principal* (pemegang saham). Agen merupakan seseorang yang diberikan amanah atau dibayar oleh *principal* untuk mengelola perusahaan untuk memenuhi kepentingan dari seorang pemegang saham (*principal*). Seorang agen (manajemen) harus memberikan pertanggungjawaban dan juga hasil secara maksimal kepada pemegang saham karena manajemen telah dipilih oleh beberapa pemegang saham.

Hubungan keagenan antara *principal* dan agen berdasarkan kontrak dimana beberapa orang dari pemegang saham akan memilih manajemen untuk melakukan tugas atau jasa atas nama pemegang saham dan memenuhi kepentingan dari pemegang saham (*principal*). Teori agensi mengasumsikan bahwa manusia memiliki sifat egois atau mementingkan kepentingan untuk diri sendiri. Pemegang saham akan berfokus pada peningkatan nilai sahamnya sedangkan manajer berfokus pada pemenuhan kepentingan pribadi, yaitu memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya. Adanya perbedaan kepentingan antara kedua pihak inilah yang menimbulkan munculnya teori keagenan. Perbedaan kepentingan pada penelitian ini terjadi terhadap kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan). Fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sedangkan

dari manajemen memiliki pandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang signifikan dengan jumlah beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda ini menyebabkan konflik antara fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak. Selain itu, pada penelitian ini konflik agensi ini terjadi pada perusahaan dimana para pemegang saham menginginkan laba perusahaan tinggi karena mereka menginginkan dividen yang besar, namun dari pihak perusahaan tentunya dengan laba yang besar ini akan membuat pajak yang harus dibayarkan menjadi besar. Dengan keadaan ini, maka perusahaan akan melakukan cara untuk melakukan tindakan penghindaran pajak agar pajak perusahaan menjadi rendah.

Kaitan teori agensi dengan penelitian ini yaitu bahwa dengan adanya perbedaan kepentingan terhadap kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan) dimana fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sedangkan dari manajemen memiliki pandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang signifikan dengan jumlah beban pajak yang rendah.

Pada penelitian ini akan membahas tentang pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, komite audit, komisaris independen dan *sosial responsibility* (SR) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log *size* nilai pasar saham, jumlah karyawan, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam tiga kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium size*), dan

perusahaan kecil (*small firm*). Dalam melakukan tax planning untuk upaya menekan beban pajak seminimal mungkin, perusahaan dapat mengelola total aset perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak yaitu dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut karena beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan. Maka dapat diasumsikan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* karena dengan melihat total aset dan sumberdaya yang dimiliki maka dapat dimanfaatkan untuk menjadikan beban penyusutan dan amortisasi sebagai pengurang beban pajak.

Definisi *leverage* merupakan kebijakan pendanaan yang berkaitan dengan keputusan perusahaan dalam membiayai perusahaan. Perusahaan disini yaitu perusahaan yang perlu memperhatikan kemampuan perusahaan dan menghasilkan laba dalam perusahaan tersebut, penggunaan hutang (*external financing*) memiliki risiko yang cukup besar atas tidak terbayarnya hutang (Prasetyorini & Fitri, 2013). Sedangkan definisi komite audit adalah suatu komite sekumpulan dewan komisaris yang dipilih oleh sekumpulan orang yang lebih besar untuk mengerjakan tugas tertentu dan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tujuan komite audit.

Komite audit terdiri dari seorang komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite, sedangkan yang lain harus seseorang yang memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan keuangan disebut pihak *ekstern* yang independen sehingga keberadaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga anggota (Yendrawati & Nugroho, 2012).

Pengertian komisaris independen adalah seorang komisaris independen dari pihak luar yang dilantik berdasarkan keputusan di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Menurut (Wulandari, 2006) menyatakan dalam meningkatkan kemampuan pengawasan kinerja dalam sebuah perusahaan dibutuhkan kehadiran komisaris independen dan dewan komisaris. Dan Pengertian dari Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate sosial responsibility* (CSR) adalah konsep perusahaan yang memiliki banyak bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya.

Pengungkapan sangat penting bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan nilai maupun keunggulan yang dimiliki perusahaan. Salah satu pengungkapan yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah *sustainability report*. *Sustainability report* atau laporan berkelanjutan merupakan gambaran kinerja perusahaan non keuangan dari tiga dimensi, yaitu dimensi ekonomi, dimensi lingkungan dan dimensi sosial. Jumlah perusahaan yang mengungkapkan *sustainability report* semakin meningkat dari periode ke periode, meskipun pengungkapan ini masih bersifat sukarela (*voluntary disclosure*).

*Sustainability report* mengedepankan transparansi sebagai salah satu bentuk untuk meningkatkan reputasi perusahaan dan kepercayaan stakeholder. Transparansi dan reputasi perusahaan yang tinggi pada konsumen berdampak pada loyalitas yang akan meningkatkan pendapatan perusahaan. Selain pada konsumen, investor akan lebih memilih perusahaan yang transparan untuk berinvestasi karena adanya kepercayaan yang tinggi pada pihak manajemen. Berbagai upaya dapat dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan untuk meningkatkan kinerja

perusahaan baik dalam aspek keuangan maupun non keuangan, dalam aspek keuangan dengan melakukan efisiensi beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Bagi negara pajak merupakan salah satu sumber penghasilan terbesar di Indonesia sehingga dengan adanya pajak, negara dapat melakukan pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu tentu bertolak belakang dengan kepenyingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Hardika, 2007)

Beberapa penelitian terdahulu memiliki hubungan dengan penelitian ini. Pertama pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*, menurut penelitian (Kim & Im, 2017) hasilnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, hasil ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian (Mahanani et al., 2017) hasilnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Lalu selanjutnya *leverage* terhadap *tax avoidance*, menurut penelitian (Oktamawati, 2017) hasilnya menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, hasil ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian (Waluyo et al., 2015) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dan diperkuat dengan hasil penelitian (Pradipta & Supriyadi, 2015) yang mendapatkan hasil tidak berpengaruh signifikan. Lalu untuk variabel independen komite audit menurut (Sunarsih & Oktaviani, 2016) dan (Sandy & Lukviarman, 2015) mendapatkan hasil komite audit



berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan hasil dari (Oktamawati, 2017) pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* tidak berpengaruh signifikan. Variabel Independen komisaris independen menurut penelitian (Sunarsih & Oktaviani, 2016) dan (Sandy & Lukviarman, 2015) mendapatkan hasil komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, hasil ini juga berbanding terbalik dengan hasil dari penelitian (Pradipta & Supriyadi, 2015) yang mendapatkan hasil komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Lalu variabel independen terakhir dari penelitian ini yaitu *corporate sosial responsibility* (CSR) menurut (Lanis & Richardson, 2012) mendapatkan hasil CSR berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan menurut (Wijayanti et al., 2016) mendapatkan hasil CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Dari penelitian-penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa hasil nya sangat bervariasi, sehingga membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan pengujian ulang terhadap *tax avoidance*. Dan dari fenomena yang terjadi, praktik *tax avoidance* ini tidak dapat dihindari di Indonesia. Peneliti ingin melakukan pengujian ulang di semua sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan, *leverage*, komite audit, komisaris independen dan *sustainability reporting* (SR) sebagai variabel independen.

### 1.1 Perumusan masalah

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah *sustainability reporting* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?

### 1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk mengetahui pengaruh *sustainability reporting* terhadap penghindaran pajak.

### 1.3 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah *literature* yang ada di STIE Perbanas Surabaya dan dapat membantu mahasiswa STIE Perbanas Surabaya yang akan menempuh skripsi di periode kedepannya.

2. Bagi Regulator

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan informasi bagi regulator dalam menentukan *tax avoidance* bagi Wajib Pajak (WP) dan juga meningkatkan tingkat pengawasan regulator terhadap Wajib Pajak (WP).

3. Bagi Perusahaan

Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa menambah informasi bagi perusahaan untu mempertimbangkan keputusan perusahaan akan penentuan utang pajak, dan juga di harapkan perusahaan dapat terhindar dari sanksi administrasi pajak dan presepsi buruk tentang perusahaan tersebut. Dan diharapkan perusahaan dapat meningkatkan tingkat kompetensi nya dan dapat melaporkan laporan keuangan yang sebenar-benarnya.

### 1.4 Sistematika Penulisan Skripsi

Di dalam sistematika penulisan proposal ini akan menjelaskan tentang tahapan yang akan dijabarkan sesuai dengan bab-bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Didalam bab 1 ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat hasil penelitian dan juga sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Didalam bab 2 ini penulis menguraikan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan bagi penulis dan juga menjadi perbandingan dengan penelitian ini. Lalu terdapat landasan teori, kerangka pemikiran dan juga hipotesis penelitian.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Didalam bab 3 ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel independen dan dependen, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan data, sampel dan metode pengumpulan data serta teknik analisis data.

## **BAB IV : GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Didalam bab 4 ini berisi gambaran subjek penelitian dan analisis data yang menguraikan tentang subjek penelitian, analisis data, hasil pengujian hipotesis serta pembahasan.

## **BAB V : PENUTUP**

Didalam bab 5 ini berisi penutup yang menguraikan tentang kesimpulan, keterbatasan serta saran untuk penelitian selanjutnya.